

BAB IV

KESIMPULAN

Proses terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kebijakan yang terjadi di Pemerintahan Pusat. Proses pembagian kekuasaan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tercermin dengan adanya asas desentralisasi, yang menjadikan adanya kekuasaan otonom di tingkat daerah. Pembentukan DPRDS sebagaimana alat kelengkapan Pemerintah Daerah sekaligus menjadi sebuah awal dari proses desentralisasi.

Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi awal daripada pembagian kekuasaan pusat dan daerah, pasca kecambuk perang revolusi. Tindak dan tanduk pemerintahan daerah yang baru terbentuk dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran yang menarik dalam sistem tata negara kita. Proses tersebut menjadi sebuah awal, dimana pemerintah daerah memiliki posisi sebagai pembantu pemerintahan pusat. Kemudian, Proses pembentukan anggota DPRDS belumlah dilakukan secara Pemilihan Umum. Namun, lewat proses keterwakilan oleh semua elemen masyarakat yang ada. Yakni dari Partai Politik dan Organisasi Masyarakat.

DPRDS dibentuk lewat sebuah peraturan yang telah disetujui bersama, dalam perjalanannya DPRDS juga sering digoyah bahkan akan dinonaktifkan. Karena kondisi politik pada saat itu yang memiliki jurang pemisa yang sangat dalam. Tidak semua

daerah juga memiliki DPRDS sebagai sebuah lembaga legislatif yang dibuat atas dasar demokrasi yang dianut Negara Indonesia. Dikarenakan kepentingan politik sesaat akan kekuasaan politik saat itu.

Keberadaan DPRDS Kabupaten Lamongan terus berjalan hingga masa kerjanya usai bahkan diperpanjang karena kondisi politik saat itu. Dimana dalam lima tahun lebih berjalan, telah banyak perubahan yang terjadi dalam Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Pada saat itu DPRDS otomatis memiliki pengaruh besar dalam proses roda pemerintahan sebagai mana datang dari elemen masyarakat.

Posisi DPRDS dipandang sebagai lembaga legislatif sekaligus Eksekutif dikarenakan pengaruhnya serta unsur dalam eksekutif yakni DPD yang berasal dari anggota DPRDS. Yang menjadikan hal tersebut sesuatu yang terlihat sangat membingungkan dalam sistem tatanegara awal. Dikarenakan sebuah bentuk rangkap jabatan dan dualisme antar lembaga.

Dari sekian banyak kekurangan DPRDS tetap akan menjadi pembelajaran yang sangat penting dari proses pemerintahan di daerah. Ada banyak sesuatu yang telah diwariskan oleh DPRDS Kabupaten Lamongan. Diantaranya lewat bentuk pembangunan, banyak sekali inisiasi yang telah dilakukan DPRDS Kabupaten Lamongan dalam proses pembangunan di Lamongan. Pembangunan Jalan, saluran irigasi serta waduk menjadi sebuah inisiasi yang akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada akhirnya sesuatu yang dilihat dari DPRDS Kabupaten Lamongan menjadikan hal tersebut meningkatkan partisipasi politik yang terjadi di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik. Karena tingkat kepercayaan kepada pemerintahan. Dapat dilihat kesuksesan gelaran Pemilihan Umum Pertama tahun 1955. Lewat angka daftar pemilih, hampir 90% menggunakan hak pilihnya.